

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik Suriah merupakan salah satu konflik besar yang terjadi di Timur-Tengah. Konflik ini dimulai pada tahun 2011 dan de-eskalasi konflik baru terjadi di tahun 2023 ketika gempa berskala besar melanda Suriah dan daerah sekitarnya (Reuters, 2023). Konflik Suriah awalnya berbentuk konflik *intrastate*—konflik internal dalam suatu negara—atau perang antara pemerintah dan warga negaranya (Karisma & Khairunnisa Simbolon, 2023), namun eskalasi konflik yang tidak terkendali memicu perubahan status konflik, yang awalnya konflik *intrastate* menjadi *internationalized conflict*—konflik yang awalnya bersifat internal tetapi kemudian melibatkan intervensi atau partisipasi negara asing dan aktor internasional lainnya—atau yang lebih dikenal dengan konflik yang diinternasionalkan (Walter, 2018). Perubahan status Konflik Suriah menjadi konflik yang diinternasionalkan dilatarbelakangi oleh keterlibatan aktor asing baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik, munculnya kelompok teroris internasional, konflik kemanusiaan dan pengungsi, serta peran organisasi internasional.

Keterlibatan aktor-aktor asing dalam konflik ini memiliki peran besar dalam menentukan keberjalanan konflik. Secara garis besar terdapat dua kelompok besar aktor luar negeri yang terlibat seperti negara-negara lain dan juga organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), UNSCR (*United Nations Security Council*) atau Dewan Keamanan PBB, Liga Arab, koalisi melawan ISIS

serta organisasi internasional lainnya (Pujayanti, 2013). Terdapat beberapa negara yang melakukan intervensi militer di Suriah seperti Rusia, Iran, Amerika Serikat, dan Turki (BBC News, 2015). Munculnya dukungan asing menjadi awal dari keterlibatan aktor luar negeri dalam konflik ini. Negara-negara tersebut memberi dukungan dalam bentuk senjata ataupun bantuan militer kepada kubu yang didukungnya.

Keterlibatan aktor luar negeri semakin meluas di tahun 2013 ketika serangan senjata kimia di Ghouta terjadi. Pada 21 Agustus 2013 pasukan pemerintah Suriah menyerang wilayah Ghouta (pinggiran Damaskus) dengan senjata kimia, diduga gas sarin. Laporan dari Dewan Keamanan PBB (2013) menyimpulkan bahwa senjata kimia itu digunakan dalam skala besar, menewaskan korban sipil cukup banyak. Pemerintah Amerika Serikat awalnya melaporkan sekitar 1.429 tewas (Pelton, 2013), sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat Suriah (SNHR) mendata sekitar 1.127 tewas dan hampir 6.000 orang lainnya mengalami sesak napas atau iritasi pernapasan (Suleiman, 2023). Insiden ini menjadi serangan kimia tersadis dalam Perang Saudara Suriah dan melibatkan roket-roket pengantar agen sarin hanya dimiliki oleh militer Suriah. Penyerangan Ghouta memicu kecaman global dan ancaman tindakan. Dewan Keamanan PBB menyatakan insiden tersebut merupakan pelanggaran serius hukum internasional (UNSCR, 2013). Amerika Serikat sampai menuntut adanya konsekuensi internasional bagi pemerintah Suriah, bahkan mengusulkan serangan militer terbatas sebagai respons (Al Jazeera, 2013).

Selain karena dilakukannya pelanggaran hukum internasional dalam bentuk penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah dalam perang saudara tersebut, aktor internasional semakin banyak memiliki andil dalam konflik ini karena bangkitnya ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*) di Suriah pada tahun 2014 (BBC News, 2018). ISIS merupakan kelompok jihadis Sunni radikal yang terkenal karena kekerasan ekstrem (BBC News, 2014). ISIS mendeklarasikan kekhalifahan di wilayah Suriah dan Irak. ISIS menguasai kota Raqqa dan melakukan teror esktrm, pemenggalan sandera asing, serta pembersihan etnis dan agama (Mehra, 2025).

Bangkitnya ISIS ini memberikan “izin” bagi negara-negara asing dan juga organisasi internasional untuk secara langsung terlibat dalam Konflik Suriah karena terorisme telah diakui secara hukum internasional sebagai tanggung jawab bersama semua negara, dan intervensi internasional terhadap kelompok teroris diperbolehkan (Mehra, 2025). Hukum-hukum internasional yang dapat dijadikan acuan dari pernyataan ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Charter*) Pasal 51 tentang Hak Bela Diri, Resolusi DK PBB 1373 (2001), Resolusi DK PBB 2178 (2014), dan Resolusi DK PBB 2249 (2015) (United Nations, 2024). Sehingga pada tahun 2014-2019, dalam rangka melawan terorisme yang dilakukan oleh ISIS, dibentuklah koalisi internasional lawan ISIS yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) yaitu *Global Coalition to Defeat ISIS*, yang berisikan lebih dari 80 negara dan organisasi internasional pada tahun 2014. Koalisi tersebut melancarkan operasi udara di Suriah untuk mengalahkan ISIS (Global Coalition

Against Daesh, 2014). Dengan adanya peperangan skala internasional dalam melawan ISIS ini, semakin kompleks juga konflik ini.

Dalam dinamika tersebut, China muncul sebagai salah satu aktor besar yang secara konsisten menunjukkan posisi politiknya terhadap konflik Suriah. Meskipun tidak terlibat dalam bentuk intervensi militer seperti beberapa negara lain, China aktif memainkan peran diplomatik melalui berbagai forum internasional, terutama di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). China tercatat menggunakan hak veto—hak untuk membatalkan resolusi ataupun keputusan yang diusung oleh suatu lembaga—beberapa kali terhadap solusi yang dianggap berpotensi membuka ruang intervensi eksternal terhadap Suriah. China juga secara konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur politik, dialog, serta prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara (Embassy of the People's Republic of China, 2012).

Sikap tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan China dalam konflik Suriah tidak hanya didorong oleh pertimbangan normatif mengenai prinsip non-intervensi, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan strategis yang lebih luas. Kawasan Timur Tengah memiliki arti penting bagi China, terutama dalam konteks keamanan energi dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Timur Tengah merupakan salah satu sumber utama pasokan energi global yang sangat penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi China. Ketidakstabilan kawasan berpotensi mengganggu energi global yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi China. Dinamika konflik dan munculnya kelompok ekstremis di kawasan juga

menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi dampak keamanan domestik bagi China, khususnya terkait isu separatisme dan ekstremisme.

Konflik Suriah juga berlangsung dalam konteks persaingan kekuatan besar dalam sistem internasional. Intervensi militer yang dilakukan oleh beberapa negara Barat dalam berbagai konflik sebelumnya, seperti di Libya pada tahun 2011, menimbulkan kekhawatiran bagi China terhadap praktik intervensi yang dapat mengancam prinsip kedaulatan negara. Maka dari itu, sikap China dalam konflik Suriah juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan prinsip tatanan internasional yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan serta membatasi legitimasi intervensi eksternal terhadap negara berdaulat (Embassy of the People's Republic of China, 2012).

Posisi China dalam konflik Suriah tidak hanya mencerminkan sikap diplomatik, tetapi juga merefleksikan kepentingan nasional yang lebih luas, baik dalam konteks stabilitas kawasan, keamanan energi, stabilitas domestik, maupun posisi strategis China dalam sistem internasional. Hal ini mendorong adanya urgensi untuk memahami kepentingan nasional China yang tercermin dalam kebijakan luar negeri yang diambil terhadap konflik Suriah.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dan dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dirancang oleh penulis untuk menganalisis kepentingan nasional China dalam konflik Suriah serta bagaimana kepentingan tersebut tercermin dalam kebijakan luar negeri China selama periode penelitian. Penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan kontinuitas maupun perubahan pendekatan yang digunakan oleh China, tetapi juga mengelaborasi peran China dalam mempertahankan serta

memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah melalui jalur diplomasi, ekonomi, dan bantuan kemanusiaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dirumuskanlah masalah sebagai berikut: Bagaimana kepentingan nasional China tercermin dalam kebijakan luar negeri China terhadap konflik Suriah pada periode 2015-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hubungan internasional, khususnya yang berkaitan dengan studi geopolitik dan strategi kebijakan luar negeri negara besar seperti China. Dengan menganalisis secara komprehensif keterlibatan China dalam konflik Suriah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dinamika kekuatan global dan implikasinya terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya teori-teori kebijakan luar negeri dan studi kawasan dengan data dan analisis empiris yang relevan.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepentingan nasional China yang dapat dilihat dari strategi kebijakan luar negerinya dalam konflik Suriah. Penelitian ini menggali bagaimana strategi tersebut dijalankan seturut dinamika konflik Suriah,

dengan memerhatikan aspek-aspek diplomasi, ekonomi, keamanan, serta faktor domestik dan internasional yang memengaruhi kebijakan tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan strategi China dalam menghadapi situasi politik di Suriah.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, peneliti, dan pihak-pihak yang memiliki minat terhadap studi hubungan internasional, khususnya dalam bidang kebijakan luar negeri China dan geopolitik Timur Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi ilmiah yang dapat digunakan dalam pengembangan teori maupun studi kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai strategi kebijakan luar negeri China yang sering kali kompleks dan multidimensional, sehingga mampu memberikan perspektif baru dalam melihat dinamika kekuatan global dan regional.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah-masalah terkait pemahaman kebijakan luar negeri China di Timur Tengah, khususnya dalam konteks konflik Suriah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang valid, terstruktur, dan mudah dipahami bagi para pembaca

yang ingin memahami strategi dan kepentingan China dalam menjaga pengaruhnya di kawasan yang penuh dengan konflik dan ketidakstabilan tersebut. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hubungan internasional, pembuat kebijakan, serta aktor-aktor yang terlibat dalam diplomasi dan geopolitik Timur Tengah dalam melihat implikasi kebijakan luar negeri China di kawasan tersebut.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk membantu menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Salah satu bacaan yang digunakan sebagai acuan peneliti dalam merangkai penelitian ini yaitu artikel jurnal "*China and the Reconstruction of Syria*" yang ditulis oleh Burton, Lyall, dan Pauley (2021) menjelaskan bahwa keterlibatan China dalam konflik Suriah tidak terutama ditujukan pada dinamika militer, melainkan berorientasi pada fase pascakonflik melalui agenda rekonstruksi ekonomi.

Penulis menunjukkan bahwa sejak awal konflik, China secara konsisten menjaga hubungan diplomatik dengan pemerintah Suriah sekaligus menghindari keterlibatan tempur langsung, dan strategi ini

berkaitan dengan pendekatan kebijakan luar negeri China yang menekankan stabilitas, kedaulatan negara, serta peluang ekonomi jangka panjang (Burton et al., 2021). China memposisikan diri sebagai mitra pembangunan dengan menawarkan bantuan kemanusiaan terbatas, dukungan diplomatik di Dewan Keamanan PBB, serta potensi investasi infrastruktur dan energi yang selaras dengan kerangka *Belt and Road Initiative* (Burton et al., 2021). Dengan demikian, rekonstruksi Suriah dipahami bukan hanya sebagai proyek ekonomi, tetapi juga sebagai sarana memperluas pengaruh geopolitik China di Timur Tengah tanpa menanggung biaya keamanan yang tinggi (Burton et al., 2021).

Namun, kajian ini lebih berfokus pada dimensi ekonomi dan rekonstruksi pascaperang sebagai instrumen perluasan pengaruh. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini tidak secara khusus membahas rekonstruksi Suriah, melainkan menganalisis kepentingan nasional China dalam konflik Suriah secara lebih luas melalui kebijakan luar negeri yang diambil oleh China. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Burton, Lyall, dan Pauley terletak pada fokus kajian.

Bacaan selanjutnya yang membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah artikel jurnal dengan judul "*Exploiting China's Rise: Syria's Strategic Narrative and China's Participation in Middle Eastern Politics*" (Ghiselli & Alsudairi, 2022), menyoroti bahwa keterlibatan China dalam konflik Suriah tidak dapat dipahami hanya sebagai inisiatif

sepihak China, melainkan juga dipengaruhi oleh strategi pemerintah Suriah sendiri dalam membangun narasi politik yang menarik dukungan China. Penulis menjelaskan bahwa Damaskus secara aktif memposisikan China sebagai mitra alternatif terhadap Barat dengan menekankan prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan stabilitas rezim, sehingga kepentingan domestik Suriah bertemu dengan preferensi kebijakan luar negeri China (Ghiselli & Alsudairi, 2022).

Dalam kerangka ini, partisipasi China di Timur Tengah berkembang melalui kombinasi dukungan diplomatik, pengakuan politik, serta keterlibatan ekonomi terbatas, sementara China tetap berhati-hati agar tidak terjebak dalam konflik bersenjata secara langsung (Ghiselli & Alsudairi, 2022). Dengan kata lain, peran China terbentuk melalui interaksi dua arah: bukan hanya China yang mencari pengaruh, tetapi juga Suriah yang “menarik” China sebagai pelindung legitimasi internasional (Ghiselli & Alsudairi, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Andrea Ghiselli dan Mohammed Alsudairi (2022) berfokus pada cara Suriah memanfaatkan meningkatnya pengaruh China dalam politik internasional untuk membangun narasi strategis yang dapat menarik dukungan politik dan diplomatik dari China. Penelitian tersebut menyoroti cara pemerintah Suriah mempersepsikan hubungan dengan China sebagai bagian dari strategi diplomatiknya dalam menghadapi tekanan dari negara-negara Barat serta untuk memperkuat legitimasi internasionalnya (Ghiselli & Alsudairi, 2022). Fokus utama

penelitian tersebut terletak pada strategi naratif dan diplomatik Suriah dalam memanfaatkan kebangkitan China dalam politik global, serta bagaimana narasi tersebut mempengaruhi keterlibatan China di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena menempatkan China sebagai subjek utama penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional China dalam konflik Suriah serta kebijakan luar negeri China yang mencerminkan kepentingan nasionalnya. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Ghiselli dan Alsudairi terletak pada sudut pandang analisis. Penelitian mereka melihat keterlibatan China melalui strategi diplomatik Suriah, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kepentingan China melalui perspektif kebijakan luar negeri.

Bacaan selanjutnya berasal dari buku yang berjudul "*China, Media, and International Conflicts*" (Peng & Zhang, 2023), lebih spesifik lagi, penelitian ini menjadikan salah satu babnya sebagai referensi penulisan yaitu bab "*China's Overlooked Role in the Syrian Crisis*", yang ditulis oleh Selim Öterbülbül (2023). Bab tersebut mengkaji peran China dalam konflik Suriah melalui analisis representasi media terhadap pola pemungutan suara China di Dewan Keamanan PBB (Öterbülbül, 2023).

Öterbülbül (2023) menyoroti bahwa meskipun China secara konsisten menolak intervensi asing dengan menggunakan hak veto, pendekatan ini mencerminkan kebijakan luar negeri yang lebih aktif di

Timur Tengah, terutama dalam mempromosikan norma "perlindungan yang bertanggung jawab" sebagai alternatif terhadap intervensi militer (Öterbülbül, 2023). Analisis ini juga mencakup bagaimana media China, Barat, dan Timur Tengah meliput peran China dalam konflik Suriah, mengungkapkan perbedaan persepsi dan narasi yang berkembang di berbagai wilayah (Öterbülbül, 2023). Dalam konteks penelitian ini, studi Öterbülbül (2023) memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana China menggunakan diplomasi dan media untuk membentuk citra internasionalnya sebagai kekuatan yang bertanggung jawab.

Fokus utama penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan China tidak bersifat militer seperti beberapa negara lain, China tetap memiliki peran signifikan dalam dinamika diplomatik konflik Suriah (Öterbülbül, 2023). Penelitian tersebut lebih menekankan pada pemetaan peran diplomatik China serta kontribusinya dalam dinamika politik internasional terkait konflik Suriah (Öterbülbül, 2023). Sedangkan penelitian ini memiliki fokus penelitian yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya memetakan peran China dalam konflik Suriah, tetapi secara khusus bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional China yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri China terhadap konflik Suriah. Perbedaan utama terletak pada kedalaman analisis. Penelitian Öterbülbül (2023) berfokus pada identifikasi dan penjelasan mengenai peran China dalam krisis Suriah, sedangkan penelitian ini berupaya

menjelaskan alasan China mengambil kebijakan tersebut dengan menganalisis kepentingan nasional yang mendasarinya.

Bacaan selanjutnya merupakan artikel jurnal yang berjudul "*The International System and the Syrian Civil War*" oleh Christopher Phillips (2022). Artikel jurnal ini menganalisis bagaimana dinamika sistem internasional memengaruhi konflik sipil di Suriah. Phillips berargumen bahwa pergeseran dari unipolaritas global yang didominasi oleh Amerika Serikat menuju multipolaritas, baik di tingkat global maupun regional, menciptakan kondisi yang mendorong keterlibatan berbagai aktor eksternal dalam konflik Suriah (Phillips, 2022). Phillips menyoroti bahwa dalam sistem multipolar, negara-negara seperti Rusia, Iran, Turki, dan negara-negara Teluk memiliki insentif untuk campur tangan dalam konflik domestik Suriah, yang pada gilirannya memperpanjang dan memperumit perang tersebut (Phillips, 2022).

Phillips (2022) juga mencatat bahwa meskipun multipolaritas sering dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan konflik, dalam kasus Suriah, intervensi Rusia pada tahun 2015 justru membantu mengarahkan konflik menuju resolusi, menantang asumsi realistik tradisional tentang dampak multipolaritas terhadap durasi perang (Phillips, 2022). Dengan demikian, studi ini menyoroti pentingnya interaksi antara sistem global dan regional dalam membentuk perilaku negara-negara dalam konflik intra-negara. Dalam konteks penelitian ini, artikel Phillips memberikan kerangka teoretis yang penting dalam memahami bagaimana perubahan

dalam struktur kekuasaan internasional memengaruhi perilaku negara-negara dalam konflik sipil.

Namun, berbeda dengan fokus Phillips yang menekankan pada analisis struktural terhadap konflik Suriah dalam konteks sistem internasional, penelitian ini menganalisis kepentingan nasional China serta strategi kebijakan luar negeri China dalam konflik Suriah. Penelitian ini berfokus secara spesifik pada China sebagai subjek utama.

Terakhir, bacaan yang membantu penelitian ini adalah artikel jurnal "*China Influence in Middle East: A Critical Analysis*" yang diterbitkan dalam *Journal of Development and Social Sciences*, yang ditulis oleh Noor, Yasmin, dan Liaqat (2025), membahas secara komprehensif peningkatan pengaruh China di Timur Tengah melalui pendekatan ekonomi, diplomasi, dan strategi keamanan. Studi ini menyoroti bagaimana China, melalui inisiatif seperti *Belt and Road Initiative* (BRI), memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Arab Saudi dan Iran, dengan fokus pada investasi infrastruktur, kerja sama energi, dan pembangunan Kawasan (Noor et al., 2025).

Pendekatan non-intervensi China, yang menekankan pada prinsip kedaulatan dan non-campur tangan, menarik bagi negara-negara Timur Tengah yang skeptis terhadap intervensi Barat (Noor et al., 2025). Namun, artikel ini juga mencatat tantangan yang dihadapi China, seperti ketegangan geopolitik, persaingan dengan kekuatan global lainnya, dan persepsi lokal terhadap niat China di kawasan tersebut (Noor et al., 2025).

Dengan demikian, studi ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana China menavigasi kompleksitas politik dan strategis di Timur Tengah untuk memperluas pengaruhnya. Dalam konteks penelitian ini, artikel tersebut memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami strategi China dalam memperluas pengaruhnya di Timur Tengah melalui pendekatan ekonomi dan diplomatik.

Namun, berbeda dengan fokus artikel tersebut yang analisis umum mengenai peningkatan pengaruh China di Timur Tengah secara regional, tanpa secara khusus menelaah satu konflik atau negara tertentu sebagai studi kasus utama, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik karena menganalisis kepentingan nasional China dalam konflik Suriah. Penelitian mereka membahas pengaruh China di Timur Tengah secara luas, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis kepentingan nasional China dalam konflik Suriah sebagai studi kasus melalui perspektif kebijakan luar negeri.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas keterlibatan China dalam konflik Suriah maupun peningkatan pengaruh China di kawasan Timur Tengah dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Burton, Lyall, dan Pauley (2021) menyoroti peluang ekonomi yang muncul dari proses rekonstruksi Suriah serta potensi keterlibatan China dalam pembangunan kembali negara tersebut. Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam memahami dimensi ekonomi hubungan antara China dan Suriah, khususnya terkait peluang investasi dan keterlibatan China dalam

proses rekonstruksi pascakonflik. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Andrea Ghiselli dan Mohammed Alsudairi (2022) menekankan bagaimana pemerintah Suriah membangun narasi strategis untuk memanfaatkan kebangkitan China dalam politik global guna memperoleh dukungan politik dan diplomatik dari China. Penelitian tersebut menunjukkan bagaimana aktor domestik Suriah berupaya memanfaatkan perubahan distribusi kekuatan global untuk memperkuat posisinya dalam hubungan internasional.

Di sisi lain, penelitian oleh Selim Öterbülbul (2023) menyoroti bahwa peran China dalam krisis Suriah sering kali kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan keterlibatan aktor besar lainnya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan China tidak bersifat militer seperti beberapa negara lain, China tetap memainkan peran diplomatik yang penting dalam berbagai forum internasional, termasuk melalui *United Nations Security Council*. Selain itu, penelitian oleh Christopher Phillips (2022) menempatkan konflik Suriah dalam konteks dinamika sistem internasional, dengan menekankan bagaimana persaingan antara kekuatan besar memengaruhi jalannya konflik serta mendorong keterlibatan berbagai aktor eksternal dalam konflik tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Noor, Yasmin, dan Liaqat (2025) juga membahas peningkatan pengaruh China di kawasan Timur Tengah secara lebih luas dengan menyoroti dimensi ekonomi, diplomatik, dan geopolitik yang memperkuat posisi China di kawasan tersebut.

Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai keterlibatan China di Timur Tengah maupun dalam konflik Suriah. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut lebih berfokus pada dimensi rekonstruksi ekonomi, strategi diplomatik Suriah, peran diplomatik China, serta dinamika sistem internasional secara umum. Kajian-kajian tersebut belum secara khusus menempatkan kepentingan nasional China sebagai fokus utama analisis dalam menjelaskan keterlibatan dan kebijakan China dalam konflik Suriah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kepentingan nasional China tercermin dalam kebijakan luar negeri China terhadap konflik Suriah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai kebijakan luar negeri China serta memperluas pemahaman mengenai dinamika keterlibatan China dalam konflik internasional, khususnya dalam konteks konflik Suriah.

1.5.2. Realisme Neoklasik

Teori realisme neoklasik merupakan teori hubungan internasional yang berasal dari penggabungan teori realisme dan teori neorealisme. Hans Morgenthau, salah satu tokoh penting dalam hubungan internasional, berpendapat bahwa realisme politik menekankan politik dalam dunia internasional didorong oleh kepentingan nasional masing-masing negara yang didasarkan pada kekuasaan, dan hal ini menjadi pengaruh utama

dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara (Morgenthau, 1949). Seiring berkembangnya zaman dan ilmu hubungan internasional, teori realisme mengalami pergeseran melalui pendekatan realisme atau realisme struktural.

Kenneth Waltz (1979) yang merupakan pelopor dari pendekatan ini menekankan bahwa neorealisme merupakan perkembangan dari teori realisme klasik yang menyatakan bahwa peran struktur anarkis dalam sistem internasional merupakan faktor utama yang membentuk perilaku suatu negara dalam bersikap. Waltz menekankan bahwa sistem internasional yang anarkis dan distribusi kekuatan antar negara atau *polarity* menjadi faktor penentu utama perilaku negara (Waltz, 1979). Menurut pendekatan neorealisme, negara cenderung bertindak defensif untuk mempertahankan posisinya dalam sistem internasional yang kompetitif, hal ini dikarenakan asumsi bahwa negara yang mampu memonopoli dan mendominasi dunia akan berkuasa sedangkan negara yang tidak memiliki kuasa ataupun pengaruh akan tersingkirkan (Waltz, 1979).

Namun realisme klasik dan neorealisme memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi kebijakan luar negeri antar negara, terutama ketika negara dengan posisi kekuatan struktural yang sama memiliki tindakan atau pendekatan yang berbeda terhadap suatu situasi yang sama. Hal ini menyebabkan pencetusan teori baru untuk melengkapi kekurangan dari teori realisme dan neorealisme.

Gideon Rose (1998) pertama kali memperkenalkan pendekatan realisme neoklasik dalam karyanya yang berjudul "*Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*". Menurut Gideon Rose, realisme neoklasik menekankan bahwa ambisi dan ruang lingkup kebijakan luar negeri suatu negara ditentukan oleh kekuatan relatif negara tersebut dalam sistem internasional dan juga oleh variabel-variabel domestik yang mempengaruhi bagaimana pengambil kebijakan memandang dan memberikan respons terhadap kekuatan tersebut (Rose, 1998). Gideon Rose menekankan pentingnya interaksi antara kekuatan relatif negara dan persepsi domestik, Rose juga berargumen bahwa realisme neoklasik merupakan teori kebijakan luar negeri, bukan teori sistem internasional (Rose, 1998).

Secara sederhana, realisme neoklasik merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan sistemik—struktur dan distribusi kekuatan dalam sistem internasional—dengan pendekatan domestik atau internal dari suatu negara—budaya, politik, persepsi, dan juga struktur domestik—untuk menganalisis hubungan internasional, terutama dalam menganalisis kebijakan luar negeri (Suci & Mohamad Rosyidin, 2018). Teori realisme neoklasik tetap memiliki unsur realisme klasik secara umum yaitu negara menjadi aktor utama dalam analisa, tanpa mengesampingkan peran dari aktor-aktor pencipta kebijakan dan elite politik dalam negara tersebut (Riry et al., 2024). Realisme neoklasik berusaha untuk menjelaskan alasan

dari pengambilan strategi setiap negara yang berbeda-beda dalam politik internasional (Ihsan, 2016).

Realisme neoklasik menghubungkan antara kekuatan relatif suatu negara dalam sistem anarki, faktor-faktor domestik, serta hasil kebijakan luar negerinya (Schweller, 2004). Dengan memadukan sistem internasional dan faktor domestik, realisme neoklasik dapat menjelaskan mengapa negara bertindak atau memiliki reaksi yang berbeda terhadap situasi yang sama (Schweller, 2004).

Realisme neoklasik menekankan bahwa sistem anarki mendorong negara untuk memprioritaskan keamanan dan bertahan hidup. Selain menatap faktor eksternal dari pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara, realisme neoklasik memadukan faktor eksternal dan internal negara. Faktor-faktor domestik seperti politik domestik, budaya, dan persepsi pemimpin juga menjadi elemen-elemen penting dalam realisme neoklasik untuk memahami pembentukan kebijakan luar negeri. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi bagaimana negara merespons tekanan sistemik atau bagaimana suatu negara menginterpretasikan niat negara lain (Schweller, 2004).

Dalam perkembangan pendekatan ini, beberapa sarjana memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kerangka analisis realisme neoklasik. Salah satu kontribusi awal yang berpengaruh berasal dari pemikiran Fareed Zakaria, yang menekankan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak hanya ditentukan oleh posisi negara tersebut

dalam sistem internasional, tetapi juga oleh kemampuan negara untuk memobilisasi sumber daya nasional dalam merespons tekanan eksternal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan realisme neoklasik sebagai kerangka teori untuk menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara. Secara spesifik, kerangka yang digunakan mengacu pada pemikiran Fareed Zakaria, yang merupakan salah satu tokoh utama dalam aliran realisme neoklasik. Dalam karyanya "*From Wealth to Power: The Unusual Origins of America's World Role*" (1998), Zakaria mengembangkan pendekatan yang menekankan bahwa kekuatan nasional tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya, tetapi juga pada kapasitas institusional negara dalam memobilisasi sumber daya tersebut dalam kebijakan luar negeri yang aktif (Zakaria, 1998).

Menurut Zakaria (1998), negara yang kuat adalah negara yang mampu memanfaatkan *national power* dan *state power*. Kekuatan nasional merupakan sumber daya negara baik yang bersifat *tangible* atau *intangible*. Sedangkan kekuatan negara adalah kemampuan negara untuk mengontrol, mengelola, dan mengarahkan potensi kekuatan nasional (sumber daya) melalui instrumen kelembagaan dan stabilitas politik domestik (Zakaria, 1998). Menurut Zakaria (1998), Negara yang mampu memainkan peran internasional secara efektif dan memiliki kekuatan ataupun pengaruh yang besar dalam sistem internasional adalah negara yang mampu memanfaatkan kedua kekuatan tersebut dengan menggunakan kapasitas institusional yang memadai.

Fareed Zakaria (1998) juga mempertegas pentingnya keseimbangan antara faktor eksternal dan internal negara dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Zakaria memperkenalkan pendekatan *Aussenpolitik*—tindakan negara dalam politik internasional sangat dipengaruhi oleh struktur anarki global serta distribusi kekuatan relatif antar negara—yang merupakan faktor eksternal dan juga pendekatan *Innenpolitik*—faktor-faktor domestik seperti struktur ekonomi, stabilitas politik, serta kapasitas institusional negara—yang merupakan faktor internal, faktor ini menentukan sejauh mana suatu negara mampu merespons tekanan internasional dan menerapkan potensi kekuatan nasionalnya ke dalam kebijakan luar negeri yang konkret.

Menurut Zakaria (1998), selain dari faktor eksternal yaitu sistem internasional dan faktor internal dalam bentuk kapasitas negara, terdapat satu faktor internal lain yang menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara yaitu persepsi elite politik mengenai kondisi internal negara tersebut (Zakaria, 1992). Analisis realisme neoklasik menurut Zakaria harus mempertimbangkan aspek non-struktural—karakter pemerintah, elite politik, dan tanggapan politik—dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri (Zakaria, 1992).

Dalam kerangka Realisme Neoklasik yang dikembangkan oleh Fareed Zakaria (1998), kebijakan luar negeri suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan yang berasal dari sistem internasional, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam memobilisasi sumber daya nasional

yang dimilikinya. Tekanan dari sistem internasional serta kapasitas kekuatan nasional yang dimiliki negara kemudian diterjemahkan oleh para pengambil keputusan menjadi kebijakan luar negeri tertentu. Menurut Zakaria (1998), kepentingan nasional tidak dipahami sebagai sesuatu yang bersifat tetap atau berdiri secara terpisah, melainkan sebagai tujuan yang tercermin melalui arah dan pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara. Dengan demikian, kepentingan nasional dapat diidentifikasi melalui pola tindakan dan kebijakan luar negeri yang dilakukan negara dalam merespons dinamika lingkungan internasional serta memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri China terhadap konflik Suriah melalui beberapa indikator utama. Pertama, sistem internasional, yang digunakan untuk melihat bagaimana dinamika politik global serta keterlibatan berbagai kekuatan besar dalam konflik Suriah menciptakan tekanan eksternal yang memengaruhi posisi China. Kedua, *national power*, yang merujuk pada sumber daya nasional yang dimiliki China, seperti kekuatan ekonomi, politik, dan diplomatik yang dapat memengaruhi keterlibatan negara tersebut dalam konflik Suriah. Ketiga, *state power*, yang mengacu pada kemampuan negara dalam memobilisasi sumber daya nasional tersebut melalui kebijakan dan tindakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah China. Keempat, persepsi elite, yang berkaitan dengan bagaimana para

pengambil keputusan di China menafsirkan dinamika konflik Suriah serta implikasinya terhadap kepentingan China.

Melalui analisis terhadap keempat indikator tersebut, penelitian ini kemudian mengidentifikasi kepentingan nasional China yang tercermin dalam kebijakan luar negeri yang diambil terhadap konflik Suriah. Dengan demikian, kerangka analisis ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara tekanan sistem internasional, kapasitas kekuatan negara, serta interpretasi para pengambil keputusan membentuk kebijakan luar negeri China dalam merespons konflik Suriah.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian



Sumber: diolah dari pemikiran realisme neoklasik Fareed Zakaria (1998)

Dengan menggunakan pendekatan realisme neoklasik versi Fareed Zakaria sebagai landasan teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara lebih mendalam dan berlapis mengenai dinamika strategi luar negeri China di Timur Tengah. Pendekatan ini memberi ruang untuk memahami tidak hanya tekanan eksternal yang memengaruhi sikap China terhadap konflik Suriah, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor domestik dan peran elite dalam proses pengambilan keputusan. Kerangka

berpikir yang telah dirancang berikut ini akan menjadi pedoman dalam menganalisis studi kasus dan mengarahkan fokus kajian pada hubungan antara kekuatan struktural, dinamika internal, kebijakan luar negeri China, dan kepentingan nasional China.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Sistem Internasional

Dalam realisme neoklasik yang dikembangkan oleh Fareed Zakaria, sama seperti teori induknya yaitu realisme, sistem internasional tetap dipahami sebagai arena yang anarki, yang berarti negara memiliki otoritas penuh dalam tatanan internasional sehingga tidak ada yang dapat membatasi ataupun mengatur perilaku negara (Eckstein, 2021). Tidak adanya kekuasaan tertinggi di atas negara-negara (*suprastate power*) atau lembaga yang berwenang atas negara menjadikan aturan-aturan internasional tidak memiliki kekuatan paksa, terutama bagi negara-negara yang kuat (Eckstein, 2021). Menurut Zakaria (1998), dalam realisme neoklasik, adanya sistem dan struktur internasional ini menjadi salah satu faktor pembentukan kebijakan luar negeri. Namun dalam realisme neoklasik Fareed Zakaria, sistem internasional hanya menciptakan tekanan atau peluang dan tidak menjadi satu-satunya faktor penentu perilaku negara (Zakaria, 1998).

1.6.1.2. *National Power*

Konsep kekuatan nasional (*national power*) merupakan salah satu konsep utama dalam realisme neoklasik Fareed Zakaria. Menurut Fareed Zakaria, kekuatan nasional merupakan sumber daya objektif suatu negara seperti ekonomi, militer, dan demografi (Zakaria, 1998). Kekuatan nasional membentuk potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkup internasional. Menurut Zakaria, ketersediaan sumber daya suatu negara bukan jaminan dari dominasi negara tersebut dan bukan tolak ukur yang cukup untuk membentuk kebijakan luar negeri (Zakaria, 1998). Ketika negara memiliki sumber daya yang banyak tetapi tidak dapat memanfaatkan dan mengolahnya dengan baik, maka negara tersebut akan terbatas kebijakan luar negerinya (Zakaria, 1998).

1.6.1.3. *State Power*

Konsep kekuatan negara (*state power*) merupakan konsep yang berbeda namun saling melengkapi dengan konsep kekuatan nasional. Konsep kekuatan negara, bagian dari realisme neoklasik Fareed Zakaria (1998), merupakan salah satu bagian penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Menurut Zakaria (1998), kekuatan negara adalah kapasitas atau kemampuan aktual negara dalam menggunakan sumber dayanya atau kekuatan nasionalnya. Dalam kerangka ini, "*national power creates the potential for*

influence; state power determines the actual capacity to exert that influence.” (Zakaria, 1998). Kekuatan negara menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri karena ketika suatu negara mampu memperkuat kapasitasnya dalam mengolah sumber daya, maka kebijakan luar negeri yang dihasilkan negara tersebut akan lebih mudah untuk dibuat sesuai kepentingan negaranya (Zakaria, 1998, hlm. 39).

1.6.1.3. Persepsi Elite Politik

Konsep terakhir yang dikemukakan oleh Fareed Zakaria adalah konsep persepsi elite politik. Menurut Zakaria (1998), elite politik memainkan peran penting dalam menentukan perilaku dan kebijakan yang dibuat oleh suatu negara. Zakaria menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri juga sangat bergantung pada bagaimana pemimpin politik menginterpretasikan tekanan sistemik dan potensi domestik (Zakaria, 1998, hlm. 21). Meskipun struktur sistem internasional memberi tekanan dan potensi domestik menjadi tolak ukur yang besar dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara, interpretasi elite terhadap ancaman dan peluanglah yang menentukan tindakan negara karena pada akhirnya, yang mengesahkan kebijakan adalah elite-elite politik itu sendiri (Zakaria, 1998).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Sistem Internasional

Dalam konsep sistem internasional yang anarkis, konflik Suriah menciptakan tekanan sistemik bagi negara-negara besar, salah satunya China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sejak tahun 2011, konflik Suriah yang awalnya bersifat internal, berkembang menjadi ajang rivalitas antara blok Barat (AS dan sekutu) dengan Rusia-Iran. Meskipun China tidak terlibat secara langsung di dalam konflik ini, China tetap menunjukkan posisi negaranya, hal ini dapat dilihat dari penggunaan hak veto China dalam forum DK PBB terhadap resolusi yang menyudutkan rezim Assad sebanyak 8 kali bersama Rusia (Foot, 2020b). China menghadapi dilema strategis antara prinsip non-intervensi dan kebutuhan melindungi kepentingan internasionalnya, seperti stabilitas regional dan pengaruh geopolitik.

1.6.2.2. *National Power*

Fareed Zakaria menyebutkan *national power* sebagai sumber daya objektif negara (Zakaria, 1998). Dalam konteks ini, China sudah menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang besar sejak awal tahun 2010-an, tetapi belum secara penuh memproyeksikan kekuatannya dalam kebijakan luar negerinya seperti Amerika Serikat (Zhao, 2016). Pada awal konflik Suriah (2011-2014), China masih bersikap pasif. Meskipun PBB negaranya

terus meningkat, pengaruh politik globalnya masih terbatas pada dukungan normatif, bukan dalam bentuk tindakan ataupun keterlibatan yang cukup kuat dalam menanggapi konflik Suriah. Namun setelah tahun 2015, China mulai memanfaatkan kekuatan ekonominya dalam keterlibatannya di konflik Suriah, misalnya melalui janji investasi rekonstruksi pasca-konflik hingga 2 miliar USD (TCA, 2017), dan menyisipkan Suriah dalam rencana ekspansi *Belt and Road Initiative* (BRI) (Gao, 2017).

1.6.2.3. *State Power*

Realisme neoklasik Fareed Zakaria menekankan bahwa hanya negara yang kuat secara institusional (*state power*) yang bisa mengubah potensi menjadi tindakan. Negara yang kaya akan sumber daya tapi tidak bisa menggunakan kekuatan tersebut akan tetap pasif. Pada fase awal konflik Suriah (2011-2014), kebijakan luar negeri China masih terbatas pada respons pasif dan normatif, hal ini mencerminkan belum maksimalnya koordinasi lintas lembaga luar negeri China terhadap konflik internasional. Setelah tahun 2014, terlihat peningkatan kapasitas negara, khususnya sejak pemerintahan Xi Jinping, kebijakan luar negeri China diperkuat di bawah kendali pusat (Central Foreign Affairs Commission). China mulai mengembangkan strategi aktif berupa: (1) Membuka hubungan dengan oposisi Suriah; (2) Menawarkan bantuan kemanusiaan langsung; (3) Memperluas misi diplomatiknya di

Timur Tengah (Nababan, 2023). Perubahan struktur kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Xi Jinping mencerminkan peningkatan *state power*, yang memungkinkan China lebih proaktif pasca-turunnya pengaruh rezim Assad di tahun 2020-an.

1.6.2.4. Persepsi Elite Politik

Dalam realisme neoklasik, elite politik tidak hanya mengeksekusi kebijakan, namun juga menjadi filter utama dalam menafsirkan tekanan internasional dan kekuatan domestik. Di bawah pemerintahan Hu Jintao (sebelum 2013), China masih berhati-hati dan sangat defensif dalam kebijakan luar negeri, termasuk dalam menanggapi konflik Suriah. Masa pemerintahan Hu Jintao masih berfokus pada kepentingan domestik dan pengembangan internal negara China. Sementara di bawah kepemimpinan Xi Jinping, terjadi perubahan visi yang semula kebijakan pasif menjadi lebih proaktif dan berorientasi global (*great power diplomacy*). Hal ini dapat dilihat dalam Dokumen Buku Putih Diplomasi China 2018, yang menyebut pentingnya keterlibatan langsung di kawasan konflik. Elite China menilai bahwa stabilitas Timur Tengah penting untuk keberlangsungan BRI dan pasokan energi. Maka dari itu, dukungan terhadap rezim Assad berubah menjadi kebijakan *dual-track*—pendekatan kebijakan luar negeri China yang menjalankan dua jalur kebijakan secara bersamaan: *state-to-state* dan *non-state* atau komersial—yang mendukung

stabilitas, tetapi juga membuka ruang kerja sama dengan kelompok oposisi. Pergeseran strategi China terhadap Suriah sangat dipengaruhi oleh preferensi elite politik, terutama setelah Xi Jinping naik, yang menafsirkan konflik ini sebagai peluang memperluas pengaruh global China.

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa strategi kebijakan luar negeri China dalam konflik Suriah merupakan upaya untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan nasionalnya di tengah tekanan sistem internasional. Dalam perspektif realisme neoklasik, tekanan yang muncul dari struktur sistem internasional tidak secara langsung menentukan kebijakan negara, tetapi dimediasi oleh persepsi elite politik dalam menafsirkan ancaman dan peluang yang ada. Dalam konteks konflik Suriah, tekanan sistem internasional muncul dari keterlibatan berbagai kekuatan besar serta dinamika geopolitik yang melibatkan Rusia dan Amerika Serikat. Situasi ini memengaruhi ruang gerak China dalam menentukan sikap kebijakan luar negerinya. Tekanan tersebut kemudian ditafsirkan oleh elite politik China melalui persepsi terhadap isu kedaulatan negara, stabilitas domestik, serta posisi China dalam tatanan internasional. Penelitian ini berargumen bahwa kebijakan China terhadap konflik Suriah merupakan hasil dari upaya China untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, yang dibentuk oleh tekanan sistem internasional dan dimediasi oleh persepsi elite politik dalam proses perumusan kebijakan luar negeri.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian terhadap “Kepentingan Nasional dalam Strategi Kebijakan Luar Negeri China terhadap Konflik Suriah (2015-2022)” adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan memahami fenomena dalam konteks sosial secara alami, dengan menekankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti. Secara lebih spesifik, penulis menggunakan studi dokumen sebagai jenis metode kualitatif. Studi dokumen adalah jenis penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai dasar untuk analisis dan interpretasi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan melihat kebijakan luar negeri China dalam menanggapi dinamika konflik Suriah dan perubahan situasi politiknya.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian tipe deskriptif-eksplanatif. Dalam membahas penelitian, penulis berusaha menggambarkan variabel X yaitu strategi kebijakan luar negeri China, pertimbangan yang dilakukan China dalam membentuk kebijakan luar negeri, dan alasan dari kebijakan luar negeri yang diberlakukan oleh China terhadap studi kasus, sekaligus menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan membahas kausalitas antara variabel X dan variabel Y yaitu konflik Suriah. Studi kasus dalam konteks penelitian ini adalah konflik Suriah atau variabel Y itu sendiri. Konflik Suriah menjadi studi kasus utama dalam melihat bagaimana China menjalankan

strategi luar negerinya dalam konflik tersebut dalam rangka mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian bersifat non-lapangan (*desk research*) dan berbasis studi keperpustakaan dengan berfokus pada sumber-sumber tertulis dan dokumen-dokumen resmi seperti surat, laporan, dan kebijakan dari institusi terkait seperti PBB, Kementerian Luar Negeri negara-negara terkait, dan media berita resmi yang mengunggah informasi terkait topik penelitian, serta catatan harian aktor-aktor penting dalam konflik yang memberikan konteks pengalaman dan refleksi individu. Selain itu, arsip foto dapat digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa atau kondisi tertentu, sementara hasil rapat, melalui notulen, mencerminkan diskusi dan keputusan yang diambil. Terakhir, jurnal kegiatan mencatat aktivitas yang telah dilakukan. Melalui analisis sumber-sumber ini, penulis dapat menggali informasi yang lebih dalam dan mengidentifikasi pola atau tema yang relevan dengan strategi kebijakan luar negeri China dalam konflik Suriah.

1.8.3. Batasan Waktu Penelitian

Penelitian ini menetapkan batasan temporal pada periode 2015-2022. Pemilihan rentang waktu tersebut didasarkan pada pertimbangan analitis sejak intervensi militer Rusia pada tahun 2015, konflik Suriah mengalami internasionalisasi yang lebih intens dan melibatkan secara langsung kompetisi kekuatan besar. Kondisi tersebut menciptakan tekanan

sistem internasional yang lebih nyata terhadap negara-negara besar, termasuk China.

Dalam periode tersebut, respons kebijakan luar negeri China terhadap konflik Suriah mulai terlihat lebih aktif, antara lain melalui penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB, peningkatan pernyataan diplomatik terkait kedaulatan Suriah, serta perhatian terhadap isu *foreign terrorist fighters* yang berkaitan dengan keamanan domestik China. Sementara itu, setelah tahun 2020 keterlibatan China cenderung bergeser ke arah rekonstruksi ekonomi dan normalisasi hubungan diplomatik. Hal inilah yang membuat peneliti memilih periode 2015-2022 sebagai fokus analisis. Menurut peneliti, periode tersebut paling relevan untuk mengamati bagaimana tekanan struktur sistem internasional mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri China seperti yang dijelaskan dalam kerangka neoklasik realisme.

1.8.4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam kasus yang diusung oleh penulis adalah strategi kebijakan luar negeri China dalam konflik Suriah. Melalui subjek yang dipilih penulis, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana China menyusun kebijakan luar negerinya dalam menyikapi konflik Suriah terutama dengan menggunakan pendekatan realisme neoklasik. Dalam analisis ini, penulis akan meneliti elemen-elemen utama dari pembentukan kebijakan luar negeri, termasuk niat ataupun faktor-faktor yang mendorong pembentukan dari kebijakan luar negeri tersebut. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk kebijakan luar negeri China dalam konflik Suriah, tetapi juga mendalami alasan dari terciptanya kebijakan luar negeri tersebut dan kepentingan nasionalnya.

1.8.5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa teks, kata-kata tertulis, serta rangkaian tindakan dan peristiwa yang membahas kebijakan luar negeri China dalam konflik Suriah serta informasi lainnya yang dapat menjawab rumusan masalah penulis yaitu strategi kebijakan luar negeri China dalam konflik Suriah mencerminkan kepentingan nasionalnya dalam dinamika konflik jangka panjang.

1.8.6. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan penulis berasal dari informasi yang disediakan oleh institusi pemerintah melalui situs resminya sering kali dianggap sebagai data primer karena berasal langsung dari pihak yang berwenang dan terpercaya. Data ini dapat berupa laporan, kebijakan, statistik, atau dokumen resmi yang dipublikasikan oleh pemerintah tanpa melalui interpretasi atau analisis pihak ketiga. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan penulis berasal dari sumber-sumber bacaan yang terbukti kredibilitasnya seperti jurnal, buku, dan situs berita

gratis (BBC, CNN, Kompas, dan sebagainya). Sumber-sumber ini yang dijadikan penulis sebagai acuan data pendukung argumen penulis.

1.8.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder, yaitu melalui penelitian kepustakaan atau *library research*. Teknik ini berfokus pada pengumpulan dan pemahaman data yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, teori, catatan, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.8. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif yaitu analisis studi kasus. Metode ini digunakan untuk analisis mendalam dari satu atau lebih kasus dalam konteks dunia nyata. Penulis mengumpulkan berbagai sumber data seperti buku, jurnal, media berita, maupun dokumen resmi untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam menganalisis strategi kebijakan luar negeri yang digunakan oleh China dalam menanggapi konflik Suriah. Penelitian ini juga akan menggunakan interpretasi tingkat dua, yang merujuk pada interpretasi kualitatif yang dihasilkan dari sudut pandang peneliti. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai analis yang memberikan makna terhadap informasi yang diperoleh. Melalui pemahaman, pengalaman, dan konteks peneliti, interpretasi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk

mendalami informasi dan data, serta menyoroti perspektif yang mungkin tidak terungkap dalam analisis data yang lebih permukaan.

1.8.9. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Kualitas data penelitian ini menggunakan paradigma kritis. Penelitian dengan paradigma kritis berfokus pada pengungkapan dan analisis realitas sosial dengan mempertanyakan ketimpangan dalam relasi sosial yang ada. Penelitian ini didasarkan pada perspektif teori kritis yang membangun asumsi-asumsi tertentu. Dalam paradigma kritis, kualitas data diperoleh melalui analisis yang mempertimbangkan konteks latar belakang, sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam tingkat yang signifikan. Dengan menggunakan paradigma kritis, penelitian ini akan memberikan data-data berdasarkan fakta yang sudah ada dan bukan berdasarkan asumsi ataupun anggapan sosial lainnya.